

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH DI PASAR SENTRAL PALAKKA KABUPATEN  
BONE**

**IKAWATI**

Nomor Stambuk: 105610503614



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH DI PASAR SENTRAL PALAKKA KABUPATEN  
BONE**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

**IKAWATI**

Nomor Stambuk: 105610503614

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di  
Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Ikawati

Nomor Stambuk : 105610503614

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

### Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. Alvas, M.S

Pembimbing II



Drs. H. Ansvari Mone, M.Pd

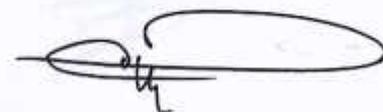
### Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Thyani malik, M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

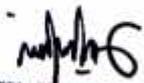
## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 0007/FSP/A.3-VIII/II/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.I) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 09 Februari tahun 2019.

## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si ( Ketua)
2. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.S



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ikawati

Nomor Stambuk : 105610503614

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar , maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 9 Februari 2019

Yang menyatakan,

Ikawati

## **ABSTRAK**

**Ikawati. Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone** (di bimbing oleh Prof Alyas Dan Ansari Mone)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone. Jenis penelitian adalah kualitatif.

Tipe penelitian ini menggunakan fenomenologis. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar kurang memperhatikan kebersihan pasar sehingga menyebabkan beberapa tumpukan sampah. Berdasarkan Perda Kota Bone Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah bahwa, dalam memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampahnya dan disediakan fasilitas tempat sampah.

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1) Akuntabilitas profesional 2) Akuntabilitas demokratis dan mekanisme Pengelolaan sampah atau kebersihan lingkungan pasar.

**Kata Kunci** : Akuntabilitas Pemerintah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone”** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Alyas, M.S selaku Pembimbing I dan Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Nasrulhaq, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ir. Asmar selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah memberi data-data yang berhubungan dengan akuntabilitas pemerintah di dinas lingkungan hidup.
6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Tola (Almarhum) dan Ibu Tahra yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendo'akan, memberikan semangat dan motivasi serta bantuan baik moral maupun materil, dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Keluarga dan kakak yang sangat berjasah yaitu Kak Akmal Dan yang membantu, mendukung dan mendo'akan serta memberikan semangat dan motivasi yang tinggi untuk bisa meraih cita-cita.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untu memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat tercinta yaitu Muh.Afif Adityawan, S.Sos, Zulkifly,S.Sos Jumarni,S.Sos, Syarifah Zaenab Alhabsyi,S.Sos Nurwahyuni Sudarwin, SKM, Andi Ainun Latifah,S.Kep, Ummul Hawa Assalam,S.farm, Meba Suasty ferdhany, S.Farm, Nurlindah Sari, S.Sos, Mawarni Anwar, S.Sos Nurlela,S.Sos, Rahmi,S.Sos Hastuti S.Sos Irma Rifany syam, S.Sos, Julyana, S.Farm dan seluruh mahasiswa kelas F selalu menemani, merasakan suka duka penyusunan skripsi dan membantu serta berjuang

bersama-sama dalam proses penyusunan skripsi ini. Kawan-kawan mahasiswa ilmu administrasi Negara angkatan 2014 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesainya skripsi ini. Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu per satu, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan oleh Karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 9 Februari 2019

Ikawati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENERIMAAN TIM</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Akuntabilitas .....	6
B. Kerangka Pikir .....	27
C. Fokus Penelitian .....	28
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	29
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknis Analisis Data .....	34

G. Pengabsahan Data .....	35
---------------------------	----

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi .....	33
B. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	35
C. Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan sampah.....	41
D. Mekanisme Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah.....	47
E. Keberhasilan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah .....	50

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	
----------------------	--

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Daftar Informan.....	29
Tabel 4.1 Nama luas wilayah per kecamatan dan jumlah kelurahan .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
--------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengelolaan yang kurang baik di Indonesia merupakan salah satu penyakit yang banyak meresahkan warga dari beberapa pencemaran polusi yang mengakibatkan penduduk Indonesia memiliki resiko tinggi terkena penyakit yang fatal. Selain faktor tersebut faktor pengetahuan masyarakat Indonesia yang kurang mendukung sikap masyarakat hingga pemerintah yang membiarkan kejadian tersebut muncul secara terus-menerus. Akuntabilitas dalam konteks administrasi publik selalu menarik untuk dijadikan bahan kajian karna inti daripada implementasi atau praktek administrasi pemerintah justru terletak pada suatu isu-isu bagian akuntabilita. Seperti halnya di Negara-negara luar akuntabilitas telah lama menjadi bahan perhatian terutama dalam kaitan dengan pembuatan kebijakan.

Akuntabilitas merupakan rencana yang terus menerus mengalami suatu perkembangan dan selalu digunakan karena memberikan citra transparansi dalam artian memberikan suatu pelayanan yang jujur tanpa ada pungli didalamnya serta kepercayaan bagi yang menjalankannya. Akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu unsure pokok mewujudkan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan terealisasi di Indonesia. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 27 dan 28 menggambarkan bahwa upaya pelayanan kebersihan dan

persampahan di lakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan teori Nolaka (2008) yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama.

Instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah pasar adalah dinas kebersihan lingkungan ( DINKEB) yang dimana sekarang telah beralih ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), lingkungan yang sehat bersih indah merupakan dambaan setiap orang tetapi dengan mewujudkannya diperlukan pemahaman dan komitmen dalam bertindak, keinginan untuk mencapainya sangat sering diberitahukan baik oleh kelompok masyarakat maupun lembaga pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.

Pemerintah kurang efektif dalam merealisasikan pengelolaan sampah karena tidak sesuai dengan visi misi bupati bone. Maka warga sekitar pasar sentral Palakka di Jl. Mt Haryono sangat resah dengan adanya tumpukan sampah yang dibiarkan menumpuk dan bahkan berserakan dijalanan sehingga mengeluarkan bau tidak sedap, warga sekitar pasar sentral tersebut sangat menyayangkan hal ini, karena apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan visi misi Bupati Bone yang katanya ingin menjadikan Bone sehat cerdas dan sejahtera

Pengelolaan pemerintah sebenarnya tidak hanya berfokus dalam mencapai tujuan ekonomi dan efisiensi, tetapi juga dalam hubungan antara

tanggung jawab Negara kepada masyarakat. Sepenuhnya masyarakat tidak hanya ingin diperlakukan sebagai konsumen akan tetapi sebagai citizens (warga) yang memiliki hak masing-masing terhadap pemerintahnya, selain itu masyarakat juga berhak menilai semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana masyarakat memiliki keinginan agar pemerintah lebih efisien.

Selain itu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan hidup yang tidak baik adalah tidak adanya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan sampah, adanya permasalahan sampah yang cukup rumit adalah permasalahan sampah pasar, sebab selain jumlahnya yang relatif banyak sehingga selama pengumpulan tumpukan-tumpukan ini akan menimbulkan sarang lalat, tikut, dan serangga, menjadi sumber pengotoran tanah, air maupun udara yang menimbulkan bau tidak sedap untuk masyarakat itu sendiri.

Menurut pengamatan sementara, penulis menyatakan bahwa pengelolaan sampah di pasar tersebut juga dipengaruhi dari tidak adanya kerjasama yang baik sesama pedagang yang ada di lokasi, karena masih kurang adanya kesadaran dari beberapa pedagang untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kerjasama yang baik antara pedagang pasar dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Bone. Dinas kebersihan juga harus berperan aktif karna pada saat pedagang membuang

sampah tersebut sudah pada tempat yang ditentukan, tetapi Dinas terkait belum juga mengangkut dan membiarkannya tertumpuk terus menerus.

Penulis juga sangat menyayangkan dengan tidak efektif yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat sudah cukup lelah dengan memberikan pengertian kepada Dinas terkait bahwa sampah yang terus menerus menumpuk akan mengakibatkan efek negatif pada warga masyarakat sekitar area pasar tersebut karena dimana sampah tersebut sudah tercampur aduk dari yang organik hingga non organik seperti sisa makanan pengunjung, plastik bekas, kertas, hingga sampah bekas dari pedagang.

Hal lain yang diharapkan pada peran pemerintah dan Dinas terkait dalam pengelolaan sampah di area pasar sentral Palakka Di Kabupaten Bone harus bersikap lebih tegas dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi Misi pemerintah Kabupaten Bone, dalam pengelolaan tersebut masyarakat bisa hidup sehat dengan tidak adanya sampah yang menimbulkan wabah penyakit bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul **“Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di Pasar Sentral Palakka Kabupten Bone?
2. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan sampah di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone
2. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan sampah di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan Ilmu Administrasi Negara dan hal-hal yang terkait dengan Akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya juga kepada warga atau masyarakat setempat, tentang pengelolaan sampah di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban. Berdasar pada pengertian tersebut Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Di samping itu, akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang mencakup baik perilaku bersifat pribadi yang disebut dengan akuntabilitas spiritual, maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang sekeliling (Adisasmita, 2011: 89).

Sjahrudin Rasul (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

Starling dalam Kumorotomo (2005: 4) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan politik. Akuntabilitas (accountability) merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat (Kumorotomo, 2005:4).

Dua model akuntabilitas yang pertama sesungguhnya tidak banyak berbeda dengan konsep-konsep tentang kontrol, pengawasan atau pengendalian dalam birokrasi publik. Kemudian konsep accountability berbeda dengan konsep demokrasi partisipatif, bahwa aktifitas politik dan pelayanan publik harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif dan kerjasama antara wakil rakyat dan masyarakat pada tingkat lokal. Sedangkan konsep market-based forms of accountability mengutamakan adanya kompetisi dan mekanisme pasar yang memungkinkan rakyat memiliki pilihan lebih banyak terhadap kualitas pelayanan yang dikehendakinya.

Denhardt dalam Kumorotomo (2005: 5) mengatakan bahwa pada umumnya literature mengenai akuntabilitas disatu pihak menyebutkan tentang pentingnya kualitas subjektif, berupa rasa tanggung jawab para pejabat dan

dilain pihak banyak menyebutkan pentingnya kontrol struktural untuk menjamin pertanggungjawaban tersebut.

Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah atau principal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas adalah pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran, target kebijakan atau program yang telah dibuat agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas (accountability) berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Akuntabilitas yaitu kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

## **B. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas**

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip (Adisasmita, 2011:90) sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Di samping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi ( penyimpangan) antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang). Dalam pelaksanaan akuntabilitas diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung

instansi untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan (Adisasmita, 2011: 90).

Dalam pelaksanaannya akuntabilitas dalam ruang lingkup pemerintahan, perlu memerhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, dikutip dari LAN dan BPKP yaitu:

1. Wajib ada pegangan dan loyalitas dari pimpinan dan staf instansi guna untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan visi dan misi sehingga tercipta pemerintahan yang akuntabel.
2. Wajib adanya suatu sistem yang dapat memberi jaminan dalam menggunakan sumber daya secara tetap dengan aturan perundang-undangan yang telah berlaku.
3. Wajib menunjukkan hasil dari tujuan dan sasaran (*goals*) yang telah ditentukan.
4. Wajib ikut andil dalam pencapaian visi dan misi beserta hasil dan manfaat yang telah diperoleh.
5. Harus transparan, jujur, inovatif, dan objektif sebagai pembawa perubahan pada pemerintah dalam bentuk ukuran suatu kinerja dan dalam penyusunan laporan hasil.

Selain prinsip-prinsip tersebut diatas, akuntabilitas juga harus mampu memberikan beberapa penjelasan tentang kelainan antara perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan serta pencapaian keberhasilan atau kegagalan didalam pencapaian tujuan pemerintah yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan pula perhatian penuh dan komitmen yang keras dari pemimpin

yang langsung memberikan tanggung jawabnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk menilai akuntabilitas instansi yang bersangkutan.

Manajemen organisasi diakui sudah akuntabel apabila dalam pelaksanaannya telah :

1. Menetapkan tujuan dengan benar.
2. Meningkatkan standar yang diinginkan untuk pencapaian dari tujuan tersebut.
3. Secara efektifitas mempromosikan standar yang telah diterapkan.
4. Pengembangan standarisasi secara efektif dan efisien.
5. Tujuan adalah sesuatu hal yang akan dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan guna untuk melihat tercapai atau tidak tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan suatu standar yang berhubungan dengan jenjang pencapaian yang diinginkan. Serta diperlukan adanya alat ukur untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah berjalan telah mencapai tujuan yang ditetapkan sejak awal. Sehingga dapat berfungsi dengan baik, dalam penerapan suatu sistem akuntabilitas, perlu diterapkan:
  - a. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program. Hal yang terpenting dalam membuat suatu sistem akuntabilitas yaitu meningkatkan suatu pernyataan bahwa tujuan dengan cara konsisten. Pada hakikatnya, tujuan dari sebuah kebijakan dan program dapat dievaluasi, Tetapi kebanyakan dari pernyataan tersebut tujuannya yang dibuat terlalu meluas, sehingga terdapat kesulitan dalam pengukurannya.

Untuk mengurangi hal tersebut dibutuhkan suatu pernyataan yang nyata dan dapat diukur.

- b. Pola pengukuran tujuan. Setelah selesai tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasi, diperlukan penetapan sebuah indikator untuk menunjukkan kemajuan pencapaian tujuan dan hasilnya. Ini adalah tugas pokok yang paling penting dan agak sulit jika dalam menyusun suatu sistem akuntabilitas. Memilih sebuah indikator untuk pengukuran kemajuan tercapainya tujuan serta sasaran kegiatan membutuhkan suatu metode tertentu.
- c. Pengakomodasian sistem insentif. Pengakomodasian sistem yang begitu insentif merupakan salah satu sistem yang akan disertakan dalam sistem akuntabilitas. Pengaplikasian sistem insentif dilakukan dengan hati-hati. Sebab sistem insentif ini akan mengakibatkan hasil yang berlawanan pula dengan yang direncanakan.
- d. Pelaporan dan penggunaan data. Sistem akuntabilitas akan mendapatkan data yang cukup banyak. Informasi yang didapatkan tidak akan bermanfaat dengan baik kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam artian menyajikan informasi yang benar-benar bermanfaat bagi pimpinan, manajer-manajer program, pembuat keputusan dan masyarakat. Bentuk dan isi yang dimuat dalam laporan harus disusun dengan baik, ini merupakan petunjuk pelaporan informasi yang terdapat dalam suatu sistem akuntabilitas.
- e. Pengembangan kebijakan dan manajemen suatu program yang diselaraskan untuk menunjang akuntabilitas. Dalam proses pengembangan

suatu sistem akuntabilitas harus pula dilakukan dengan cara yang telah terselaraskan, tidak secara bebas program demi program. Akuntabilitas juga telah menyajikan sebuah deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran yang telah disetujui.

### **C. Jenis Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan sikap dan watak kehidupan manusia yang dapat dilihat dari dua sisi, yakni: (a) akuntabilitas internal seseorang dan (b) akuntabilitas eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban orang tersebut kepada tuhan. Akuntabilitas semacam ini meliputi pertanggung-jawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya, hanya diketahui dan dipahami oleh dirinya sendiri. Oleh karena itulah akuntabilitas internal disebut sebagai akuntabilitas spritual. Akuntabilitas semacam ini sangat sulit diukur karena tidak adanya ukuran yang jelas dan diterima oleh semua orang, serta tidak ada yang mengevaluasi dan memonitor sejak proses sampai pada peretanggung-jawabannya seseorang. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya, baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang memenuhi akuntabilitas eksternal mencakup pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya pemerintah, kewenangan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Adisasmita, 2011: 78).

#### **D. Macam-macam akuntabilitas**

Rosjidi jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:

1. Akuntabilitas internal, berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus public baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodic maupun sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).
2. Akuntabilitas Eksternal, berlaku bagi setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima, dilaksanakan, ataupun perkembangannya untuk dibahas keadaan pihak eksternal lingkungannya.

Elwood (1993), Ada dua dimensi akuntabilitas yang harus terpenuhi oleh organisasi sector publik atau badan hukum yaitu:

1. Akuntabilitas Proses, terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas melalui pemberian pelayanan publik yang cepat dan responsif.
2. Akuntabilitas Program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya

yang minimal. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dikutip dari Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membedakan akuntabilitas dalam dua macam yaitu:

- a. Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya output, tapi sampai *outcome*. *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur output dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu restopektif dan prospektif. Peran restopektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.
- b. Akuntabilitas Prosedural, memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat. Akuntabilitas prosedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Samuel Paun (dalam Tjahya Supriatna, 2001:102) akuntabilitas dapat dibedakan atas tiga bagian diantaranya: democratic accountability, professional accountability, and legal accountability dimana penjelasan lebih lanjut yaitu:

- a. *Professional Accountability*, para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat.
- b. *Democratic Accountability*, merupakan gabungan antara administrative dan politic accountability. Menggambarkan pemerintah yang dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kinerja dan semua kegiatannya terhadap pemimpin politik.

#### **E. Akuntabilitas Pemerintah**

Terselenggaranya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan negara secara baik dan benar diperlukan adanya pengawasan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi dan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta

pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Karena pengawasan sebagai bagian dari aktifitas dan tanggungjawab pimpinan, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi (LAN, 2004: 490).

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi ialah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintah pada umumnya. Setelah melihat bahwa birokrasi publik selama ini hanya dijadikan sebagai alat politik bagi rejim yang berkuasa, rakyat kini sulit untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat atau unsur-unsur yang lain yang terdapat dalam sistem tersebut. Kesulitan untuk menuntut pertanggung jawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tunggal. Ketunggalan pemerintah menyebabkan semua kebijakan terpusat (setralistik). Semua informasi yang masuk ke lembaga publik akan tetap disalurkan melalui penyelenggara pemerintah (Kepala Daerah). Akibatnya, setiap gugatan terhadap pemerintah hanya akan di "peti eskan". Kesulitan ini menjadi indikasi bahwa selama penyelenggaraan pemerintah terpusat atau diajukan ke lembaga publik akan sia-sia atau akan kandas dalam proses dan penegakan kebijakan, karena proses atau sistem akuntabilitas lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan syarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik (Abdullah, 2009: 168).

Apapun yang dilakukan pemerintah seringkali disebut juga sebagai representasi Negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu maupun menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Rasyid dalam Kumorotomo (2005: 15) menyatakan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat biasa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah modern dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Thomas Hobbes dalam Kumorotomo (2005: 15) pemerintah dipastikan kehadirannya untuk memenuhi tujuan mulai, yaitu terciptanya keteraturan sebagai apa yang kita istilahkan dengan terciptanya ketentraman dan ketertiban umum. Istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintah berlangsung.

Pertanggungjawaban para penyelenggara negara, khususnya kepada pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, pada hakekatnya merupakan perwujudan akuntabilitas publik sebagai prasyarat mendasar bagi terciptanya pemerintahan yang baik. Mekanisme pertanggung jawaban kepala pemerintah (eksekutif) dalam sistem demokrasi perwakilan yang dianut banyak negara, pada umumnya dilakukan melalui media pelaporan

pertanggungjawaban pihak eksekutif pemerintah di hadapan lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Mekanisme akuntabilitas publik kepala pemerintahan seperti ini dikenal dengan mekanisme *checks and balance*, dimana lembaga perwakilan rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat melakukan kontrol terhadap Kepala Pemerintahan atas penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan pemerintah negara yang dipercayakan rakyat kepada eksekutif tidak dimanfaatkan secara sewenang-wenang untuk kepentingan eksekutif sendiri dan atau kelompok-kelompok tertentu dalam cara yang merugikan atau memarjinslkan kelompok masyarakat lainnya. Adanya mekanisme keseimbangan dan kontrol (*checks and balance*) inilah yang menjadi salah satu ciri umum terselenggaranya sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel (LAN : 2004: 4)

Rasyid (2000: 36) fungsi-fungsi pemerintah adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim dikenal dengan fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat, fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat . oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta

keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Soewargono (1996:1) dan Djohan (1998:16) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini bahwa semua warga Negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peranan yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

#### **D. Pengertian Mekanisme**

Menurut Bagus (1996) Mekanisme adalah suatu interaksi bagian satu dengan bagian yang lainnya pada suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuannya. Sedangkan Poerwadarmita, (2003) Mekanisme adalah cara kerja dan seluk beluk dari suatu alat, perkakas dan sebagainya

Mekanisme sudah menjadi satu kata yang sering dipakai sekarang ini. Terdapat banyak pengertian mekanisme dengan memiliki konteks yang berbeda. Pada dasarnya, mekanisme berasal dari bahasa Yunani "Mechane" berarti instrument, mesin pengangkat beban, peralatan yang dipakai untuk bisa

membantu sesuatu dan juga perangkat. Mekanisme berasal dari kata “mechos” berarti sarana dan cara dalam menjalankan sesuatu. Secara umum bahwa mekanisme mempunyai empat pengertian yang berbeda.

### **E. Pengertian Sampah**

Sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan, (Slamet, 2002:15 ).Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami sampah adalah :

1. Sampah yang dapat membusuk (*garbage*), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H<sub>2</sub>S yang bersifat racun bagi tubuh.
2. Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain.
3. Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.
4. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit *reversible* atau berpotensi *irreversible* atau sakit berat yang pulih.
5. menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

## **F. Pengelolaan Sampah**

Efrianof (2001) pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi media perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air, dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya.

- a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah Kenyataan yang ada saat ini, sampah menjadi sulit dikelola oleh karena berbagai hal :
  1. Pesatnya perkembangan teknologi, lebih cepat dari kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami masalah persampahan
  2. Meningkatnya tingkat hidup masyarakat yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan
  3. Meningkatnya biaya operasi, pengelolaan dan konstruksi di segala bidang termasuk bidang persampahan
  4. Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien, tidak benar, menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah, sehingga juga memperbanyak populasi vector pembawa penyakit seperti lalat dan tikus.

5. Kegagalan dalam daur ulang maupun pemanfaatan kembali barang bekas juga ketidakmampuan masyarakat dalam memelihara barangnya sehingga cepat rusak, Ataupun produk manufaktur yang sangat rendah mutunya, sehingga cepat menjadi sampah Pengolahan tahap akhir :Sanitary landfill (penimbunan berlapis), Incenaration (pembakaran), Open dumping Pengolahan tahap awal, Reduce (mengurangi), Reuse (mengggunakan kembali ), Recycle (mendaur ulang)
6. Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai Tempat Tembuangan Akhir (TPA) sampah, selain tanah serta formasi tanah yang tidak cocok bagi pembuangan sampah juga terjadi kompetisi yang semakin rumit akan penggunaan tanah
7. Semakin banyaknya masyarakat yang berkeberatan bahwa daerahnya dipakai sebagai tempat pembuangan sampah
8. Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan
9. Sulitnya menyimpan sampah sementara yang cepat busuk, karena cuaca yang semakin panas.
10. Sulitnya mencari partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan memelihara kebersihan
11. Pembiayaan yang tidak memadai, mengingat bahwa sampai saat ini kebanyakan sampah dikelola oleh pemerintah
12. Pengelolaan sampah di masa lalu dan saat sekarang kurang memperhatikan faktor non teknis dan non teknis seperti partisipasi masyarakat dan penyuluhan tentang hidup sehat dan bersih.

## b. Metode Pengolahan Sampah

1. Penerapan prinsip 3-R, 4-R atau 5-R Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam penanganan sampah misalnya dengan menerapkan prinsip 3-R, 4-R atau 5-R. Penanganan sampah 3-R adalah konsep penanganan sampah dengan cara Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), Recycle (mendaur ulang sampah), sedangkan 4-R ditambah Replace (mengganti) mulai dari sumbernya. Prinsip 5-R selain 4 prinsip tersebut di atas ditambah lagi dengan Replant (menanam kembali). Penanganan sampah 4-R sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sampah padat perkotaan yang efisien dan efektif, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya pengelolaan sampah.

a. Reduce Prinsip Reduce dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program reduce: Hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, gunakan kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain, gunakan baterai yang dapat di charge kembali, jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan, ubah pola makan (pola makan sehat : mengkonsumsi makanan segar, kurangi makanan kaleng/instan), membeli barang dalam kemasan besar (versus kemasan sachet), membeli barang dengan kemasan yang dapat di daur ulang

(kertas, daun dan lain-lain), bawa kantong/tas belanja sendiri ketika berbelanja, tolak penggunaan kantong plastic, gunakan rantang untuk tempat membeli makanan , pakai serbet/saputangan kain pengganti tisu, kembali kepemakaian popok kain bagi para ibu.

- b. Reuse Prinsip reuse dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Dan juga menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program reuse: pilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang, gunakan produk yang dapat diisi ulang (refill), kurangi penggunaan bahan sekali pakai, plastik kresek digunakan untuk tempat sampah, kaleng/baskom besar digunakan untuk pot bunga atau tempat sampah, gelas atau botol plastik untuk pot bibit, dan macam-macam kerajinan, bekas kemasan plastik tebal isi ulang digunakan sebagaitas, styrofoam digunakan untuk alas pot atau lem, potongan kain/baju bekas untuk lap, keset, dan lain-lain, majalah atau buku untuk perpustakaan, kertas koran digunakan untuk pembungkus.
- c. Recycle, prinsip recycle dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Menurut Suyoto (2008) tindakan yang dapat dilakukan

berkaitan dengan program recycle: Mengubah sampah plastik menjadi souvenir, lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, mengubah sampah kertas menjadi lukisan atau mainan miniature

- d. *Replace*, Prinsip *replace* dilakukan dengan cara lebih memperhatikan barang yang digunakan sehari-hari. Dan juga mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Prinsip ini mengedepankan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti mengganti kantong plastik dengan keranjang saat berbelanja, atau hindari penggunaan styrofoam karena banyak mengandung zat kimia berbahaya.
- e. *Replant*, Prinsip *Replant* dapat dilakukan dengan cara membuat hijau lingkungan sekitar baik lingkungan rumah, perkantoran, pertokoan, lahan kosong dan lain-lain. Penanaman kembali ini sebagian menggunakan barang atau bahan yang diolah dari sampah.

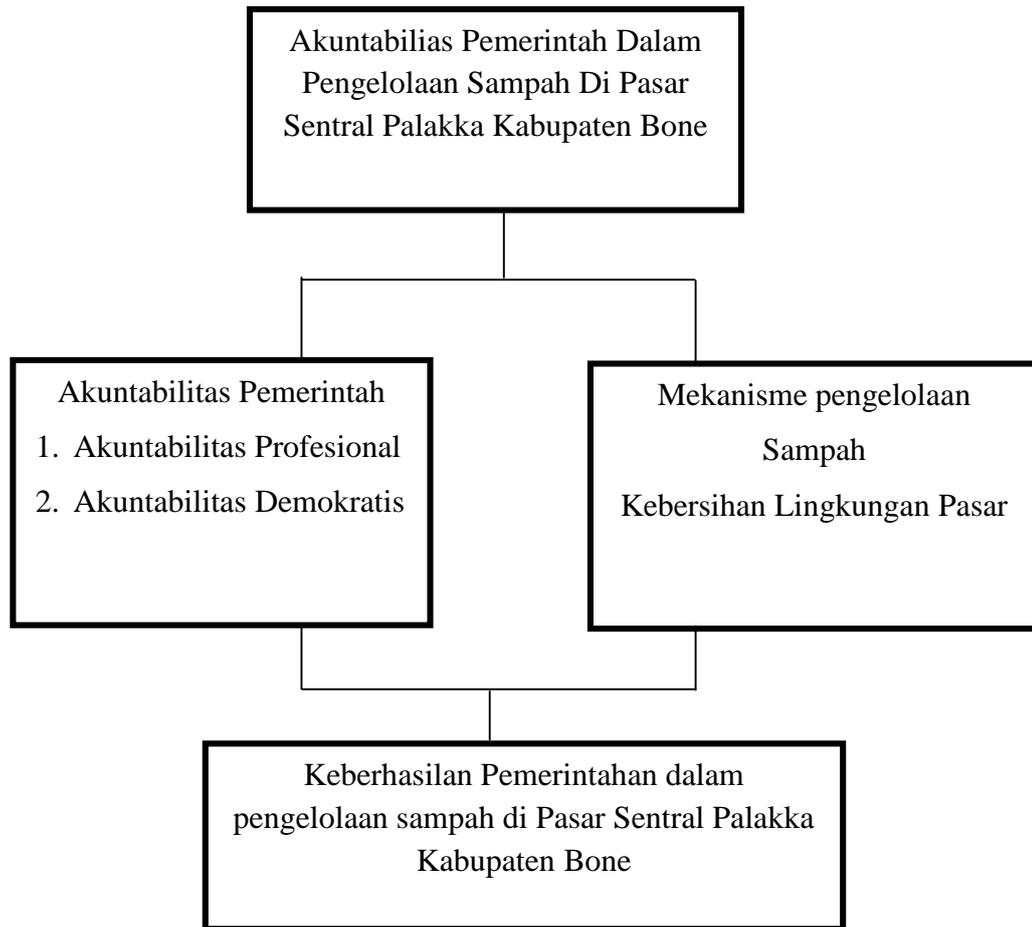
### **G. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian terdahulu Dessy Kartika Sari (2017) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda Di Kecamatan Sambutan menyatakan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda di Kecamatan Sambutan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat di wilayah Kecamatan Sambutan yang tidak mentaati aturan tersebut serta terdapat

kendala-kendala yang menghambat proses pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

## **H. Kerangka Pikir**

Secara umum pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai politisi, perumus kebijakan, dan administrator, pemerintah sebagai perumus kebijakan memiliki tugas yang sangat penting karena pemerintah bisa jatuh karena pemilihan kebijakan yang ditetapkan dan diterapkan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua antara lain akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Peran pemerintah sebagai regulator dan *service provider* dalam pengelolaan sampah tidak terlepas dari teknis pengelolaan sampah yang meliputi timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan untuk melihat Keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan sampah di area Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

### 1) Fokus penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan sehingga tidak perlu dimaksudkan dalam penelitian (bungin, 2001:24). Dari judul akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone, untuk mengetahui bagaimana peran dan mekanisme pemerintah dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan teori dari samuel paun (dalam Tjahya suprianta, 2001 : 102 ) akuntabilitas dapat dibedakan atas tiga bagian di antaranya akuntabilitas profesional, akuntabilitas demokratis sehingga untuk

mengetahui pembagian kerja staf serta bagaimana tanggung jawab pimpinan kemudian tentang bagaimana mekanisme keadaan kebersihan lingkungan pasar sentral sambaloga dan untuk melihat keberhasilan pemerintahan dalam pengelolaan sampah di pasar sentral watampone kabupaten bone.

## 2) Deskripsi fokus penelitian

- a. Demokratis Akuntabilitas, yaitu pemerintah yang diberi amanat untuk mempertanggungjawabkan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku atas kinerja dan semua kegiatannya terhadap pemimpin politik.
- b. Profesional Akuntabilitas para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat.
- c. Mekanisme Pengelolaan Sampah  
Keberihan lingkungan (pasar) adalah tanggung jawab setiap orang termasuk didalamnya pemerintah melalui kebijakan dan realisasi tindakan nyata, selanjutnya dibutuhkan proses dan juga tindakan nyata seperti (1) memberikan kesadaran tentang arti penting lingkungan kepada masyarakat (2) buatlah tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik (3) membuat jadwal rutin untuk melakukan aktivitas pembersihan lingkungan (4) membiasakan membuang sampah pada tempatnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang di butuhkan oleh peneliti yaitu selama 2 bulan setelah seminar proposal mulai dari bulan Agustus sampai Oktober 2018. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup secara langsung dengan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di area pasar sentral palakka Kabupaten Bone, Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan di area pasar Sentral Palakka. Lokasi penelitian tersebut bertempat di jalan H. A, Mappanyukki dan Mt Haryono Watampone Kabupaten Bone, alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu, karena beberapa bulan yang lalu diberitakan kondisi sampah yang menumpuk di area Pasar Sentral Palakka.

#### **B. Jenis Dan Tipe Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Bodgan dan taylor (suwardi 2008) mendefenisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Sedangkan pada penelitian ini akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu adalah untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan sampah di jalan sambaloge watampone Kabupaten Bone, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

## b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan fenomenologi yakni suatu bentuk suatu penelitian yang menekankan pada subyektivitas pengalaman hidup manusia untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.

## C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Data primer merupakan data empiris yang di peroleh dari sebuah informan yang berdasarkan hasil observasi dan wawancara jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai Akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone, serta data-data yang mendukung dan sertas untuk melengkapi penyusunan proposal.
2. Data Sekunder, adalah data empiris yang di kumpulkan penelitian dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis dan digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang di kumpulkan peneliti adalah data-data mengenai Akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone.

## D. Informan penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian ini. *Purposive sampling* merupakan tekhnik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang permasalahan penelitian ini sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang akan diteliti (Sugiyono,2015) sesuai dengan kebutuhan peneliti terkait

dengan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone.

**Tabel 3.1 Daftar Informan**

No	Nama	Pekerjaan	Inisial	Keterangan
1	Ir. Asmar	Kepala dinas Lingkungan hidup	IA	I Orang
2	Andi Tjenri Satta S.H	Sekretaris Dinas Lingkungan hidup	TS	I Orang
3	Andi Takdir S.T	Seksi Penanganan Sampah	AT	I Orang
4.	Muh. Tabah Asbah S. Sos	Seksi Pengurangan Sampah	TA	I Orang
5	Fatimah	Pedagang Pasar	FT	I Orang
6	Suarni	Pedagang Pasar	SU	I Orang
7	Saripah	Masyarakat Setempat	SP	I Orang
8	Abdul Malik	Masyarakat Setempat	AM	I Orang

Peneliti memilih beberapa informan di atas, Penelitian mengenai akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di area pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dalam masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data ini dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yang didapatkan melalui tahap wawancara kemudian observasi terhadap para pegawai ataupun pemilik lapak yang berjualan di Pasar Sentral Palakka

Kabupaten Bone. Data sekunder yang didapatkan dalam bentuk arsip maupun sebuah dokumen tertulis lainnya yang menunjang penelitian ini. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen seperti diuraikan dibawah ini.

### 1. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada tempat penelitian (Nawawi, 1993:100). Dalam metode observasi ini penulis dapat melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian sambil mencari informasi lengkap mengenai permasalahan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sampah dipasar sambaloga di kabupaten bone

### 2. Wawancara

Wawancara ini suatu kegiatan pengumpulan data dengan teknik tanya jawab antara dua orang yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan suatu tujuan peneliti (Hadi, 1993:193). Teknik tanya jawab berlangsung melalui kontak secara langsung dengan mendatangi lokasi kantor dinas lingkungan hidup dan pasar sambaloga di kabupaten bone

### 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan data menggunakan cara mengumpulkan data baik berupa bahan tertulis maupun dalam bentuk gambar yang dapat diambil untuk memperluas data yang nyata.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dan interpretatif untuk mendapatkan suatu makna yang sesuai dengan kajian budaya yang di harapkan. Pengolahan suatu data dalam penelitian kualitatif menurut Nawawi (1993) adalah suatu proses yang berlangsung serentak. Selanjutnya, berikut ini merupakan langkah-langkah suatu analisis data yang digunakan. Miles dan Huberman (1992).

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, atau mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data kemudian dapat disimpulkan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat data, menelusuri tema, dan membuat sebuah gugus-gugus. Proses transformasi ini akan berlangsung terus sehingga laporan peneliti lengkap tersusun.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data ini merupakan suatu upaya penyusunan kumpulan suatu informasi ke dalam suatu matrik atau konfigurasi yang dapat dipahami dan di pelajari. Konfigurasi yang demikian ini akan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atau keputusan yang cocok. Kecenderungan kognitif manusia adalah menyederhanakan sebuah

informasi yang kompleks dan jelas ke dalam satuan bentuk yang dapat dipahami. Hal ini merupakan cara utama untuk menganalisis data kualitatif yang valid. Penyajian data ini bisa dengan matrik, grafik, atau bagan yang dirancang untuk menggabungkan informasi.

### 3. Menarik Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data ini, peneliti mulai mencari makna data yang telah terkumpul. Selanjutnya peneliti ini mencari arti dan penjelasannya, kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu ke dalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan secara jelas. Data yang sudah terkumpul dan disusun ke dalam satuan-satuan, kemudian dikategorikan sesuai dengan rincian masalahnya. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu atau dua dengan yang lainnya sehingga mudah ditarik simpulan sebagai jawaban terhadap setiap permasalahan yang ada. Kegiatan analisis data ini merupakan suatu proses siklus yang interaktif. Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data, menyajikan, dan menyimpulkan secara bersamaan yang akan berlanjut dan berulang terus-menerus.

### **G. Pengabsahan data**

Validitas sangat mendukung hasil akhir dari penelitian ini, oleh karena itu diperlukan suatu teknik untuk memeriksa suatu keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran

data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William (Sugiono, 2015: 273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dapat di artikan sebagai pengecekan data dari berbagai suatu sumber dan penjelasan dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian penelitian ini terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber yaitu dikerjakan dengan cara mengecek atau mencocokkan suatu data pada sumber lain keabsahan data yang telah didapatkan sebelumnya untuk mendapatkan sebuah hasil yang ada.
2. Triangulasi pengumpulan data yaitu bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan dan ketidakakuratan.
3. Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan informan dalam kondisi waktu yang berbeda untuk menentukan kredibilitas data.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Gambar Umum Objek Penelitian**

###### **a. Lokasi kabupaten bone**

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak atau yang berposisi di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar dan mempunyai Ibu kota Tanete Riattang. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4013'-5006' Lintang Selatan dan antara 119042'-120040' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.

###### **b. Luas Wilayah**

Luas wilayah Kabupaten Bone tercatat 4.559 km<sup>2</sup> dengan luas area terbangun 2.747,36 Ha, meliputi 27 kecamatan yang terdiri dari 328 Desa dan 44 Kelurahan, dimana Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing adalah 463,35

km<sup>2</sup> (10,16%) dan 344,24 km<sup>2</sup> (7,55%). Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang yang merupakan ibukota kabupaten dan Kecamatan tanete Riattang dengan luas masing-masing adalah 23,79 km<sup>2</sup> (0,52 %) dan 48,88 km<sup>2</sup> (1,07%).

Tabel 4.1 Nama luas wilayah per kecamatan dan jumlah kelurahan

Kecamatan	Jumlah kelurahan/desa	LUAS WILAYAH			
		administrasi	Terbangun		
		(km <sup>2</sup> )	(%) terhadap total	(Ha)	(%) terhadap total
Bontocani	11	46,335	10,116	241.82	2,24
Kahu	20	18,95	4,16	595.85	5,52
Kajuara	18	12,413	2,72	491,11	4,55
Salomekko	8	84,91	1,88	222,22	2,08
Tonra	10	20,032	4,39	187.31	1,73
Patimpeng	11	13,047	2,88	244.93	2,72
Libureng	20	34,425	7,55	482.50	4,47
Mare	18	28,35	5,78	387.62	3,42
Sibulue	20	15,58	3,42	273.42	4,38
Cina	12	14,75	3,24	395.14	3,66
Barebbo	18	11,42	2,5	387.82	3,59
Ponre	9	29,3	6,43	203.02	1,88
Lappariaja	9	13,8	3,03	362.60	3,36
Lamuru	12	20,8	4,56	395.87	3,66
TelluLimpoe	11	31,81	6,98	210.08	1,94
Bengo	9	16,4	3,6	395.80	3,66
Ulaweng	15	16,167	3,55	380.69	3,52
Palakka	15	11,532	2,53	341.22	3,16
Awangpone	18	11,07	2,43	421.41	3,90
TelluSiattinge	17	15,93	3,49	591.76	5,48
Amali	15	11,913	2,61	326.77	3,03
Ajangale	14	13,9	3,05	421.61	3,90
Duaboccoe	22	14,49	3,18	454.87	4,21
Cenrana	16	14,36	3,15	339.09	3,14
T.RiattangBarat	8	5,368	1,18	637.58	5,90
Tanete Riattang	8	2,379	0,52	701.38	6,49
T.RiattangTimur	8	4,888	1,07	528,53	4,89

c. Jumlah Penduduk

Laki-laki = 356.691

perempuan = 390.282

jumlah total = 746.9773

d. VISI DAN MISI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE

1) visi

“terwujudnya kelestarian lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat yang sehat”

2) misi

a) mewujudkan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

b) mewujudkan pemulihan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

c) meningkatkan keterediaan informasi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

d) meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

e) meningkatkan pelayanan kesekretariatan dalam menunjang pembanguana lingkungan hidup.

**B. SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. kepala dinas lingkungan hidup

b. sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. bidang tata lingkungan terdiri dari :

1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan hidup

d. bidang pengelolaan sampah dan limbah

1. Tugas Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

a) Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan tentang kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup daerah.

b) Pembinaan tentang perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup daerah kepada masyarakat.

c) Penyelenggaraan tentang fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang lingkungan hidup.

d) Pembinaan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

e) pelaksanaan tentang urusan kesekretariatan.

- f) penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat Dinas

- a) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan suatu tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- b) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan suatu tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- c) penyusunan tentang rencana program dan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup.
- d) pengorganisasian tugas-tugas pada Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang- bidang lain dinas lingkungan hidup;
- e) penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan.
- f) administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

## 3. Sub Bagian Program mempunyai tugas

- a) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja
- b) melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

- c) melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan.
  - d) melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
  - e) melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja.
8. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang dipimpin atau di ketuai secara langsung oleh kepala seksi pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dalam perlindungan sumber daya alam.
  - b. Pelaksanaan kegiatan dalam pengawetan sumber daya alam.
  - c. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
  - d. pelaksanaan kegiatan pencadangan sumber daya alam.
  - e. pelaksanaan kegiatan suatu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
  - f. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.
  - g. Perencanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati.
9. Bidang Pengelolaan Sampah
- a. Bidang Pengelolaan Sampah yang dipimpin secara langsung oleh kepala bidang pengelolaan sampah yang mempunyai tugas dalam penyusunan kebijakan perencanaan pengelolaan sampah daerah
  - b. Bidang Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan suatu tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kegiatan informasi dalam pengelolaan sampah tingkat kabupaten dan kota.
- 2) Penetapan suatu target dalam pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah di setiap kurun waktu tertentu.
- 3) Perumusan suatu tujuan kebijakan dalam pengurangan sampah.
- 4) Penyusunan kegiatan pembinaan dalam pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri

10. Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh kepala seksi pengurangan sampah mempunyai tugas

- a. penyusun informasi pengelolaan tingkat kabupaten/kota;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri.
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
- f. pembinaan daur ulang sampah.
- g. penyediaan fasilitas daur ulang sampah.

11. Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh kepala seksi penanganan sampah mempunyai tugas

- a. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- b. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- c. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- d. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah

14. Seksi Pemantauan Lingkungan yang di ketuai secara langsung oleh kepala

Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas

- a. Pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air.
- b. pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara.
- c. pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas tanah.
- d. pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas yang berada di sekitar pesisir dan laut;

15. Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh kepala seksi pencemaran

lingkungan mempunyai tugas

- a. Pelaksanaan kegiatan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi.
- b. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan, pencemaran, (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dari sumber pencemar institusi dan non institusi.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) dari sumber pencemar institusi dan non institusi

## 17. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan melakukan pembinaan dan pengawasan LH untuk peningkatan kapasitas LH.
- b. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH dalam melaksanakan tugas

## 21. UPT Dinas

- a. UPT Dinas diketuai secara langsung oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang teknis yang diurus.
- b. (Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur atau di susun lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **C. Akuntabilitas pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone**

### **1. Akuntabilitas Pemerintah**

Setiap tingkatan organisasi dalam penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki yang berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada atasannya secara langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periode maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah yang telah di sampaikan

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang berisi tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai wewenang untuk menetapkan dan menyelesaikan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya suatu kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup di kabupaten bone tersebut dapat di harapkan meningkatkan suatu kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian sasaran prioritas nasional yang termuat dalam Program dinas lingkungan hidup di kabupaten bone tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tanggung jawab yang di uraikan berdasarkan sebagai berikut

**a. Professional Accountability**

*Professional Accountability*, para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat. Tugas pemerintah dalam bidang pengelolaan sampah dalam melaksanakan suatu tugas sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi tentang penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota, kemudian penetapan target dalam pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu

yang telah di tentukan dengan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri. Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi penanganan sampah AT dari dinas kebersihan lingkungan hidup kabupaten bone menyatakan bahwa :

Upaya pemerintah dalam menangani sampah yang di ada di kabupaten bone sangatlah membutuhkan informasi sebab pemerintah dari dinas lingkungan hidup akan membuat target dalam pengurangan sampah dari sebuah informasi yang kita dapat. Setelah kita sudah dapat sebuah informasi barulah kita dapat bertindak. (Hasil Wawancara AT, 25 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dapat di gambarkan bahwa Penanganan sampah dapat dilakukan oleh pelaku atau orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan lainnya. Pengelolaan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan sampah pada tempat penampungan sementara/TPS untuk selanjutnya dilakukan pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Adapun hasil wawancara dari seksi pengurangan sampah bapak TA menyatakan bahwa

selama ini kami belum berkoordinasi secara maksimal dengan pengepul dan pemulung, karena mereka berdiri sendiri dan berada diluar kita (instansi) tidak ada hubungan dan tidak ada kaitannya walaupun yang mereka yang dikerjakannya itu sampah tapi tidak ada hubungannya kecuali pemulung dan pengepul yang ada di Tempat Penampungan Akhir (TPS) dan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) nah mereka kita kendalikan dan kita arahkan karena mereka berdiamnya (menetap )di Lokasi dekat (kantor) kita jadi kita kendalikan mereka, jadi harus dibedakan itu.( Hasil wawancara TA, 25 September 2018)

Sesuai dengan hasil wawancara dapat digambarkan bahwa terdapat beberapa fakta yang didapat terkait pengelolaan sampah di kabupaten bone. Ruang lingkup koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan petugas kebersihan yang biasa dikenal dengan pengepul dan pemulung dalam pengelolaan sampah hanya mencakup area tertentu saja, Seperti di TPA , TPS dan di Sekitar wilayah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kantor bidang Persampahan. Sementara itu, pemulung dan pengepul yang berada diluar jangkauan Dinas Lingkungan Hidup bergerak sendiri dikarenakan mereka diluar dari instansi walaupun yang mereka kerjakan itu berkaitan dengan persampahan. Sehingga, Dinas Lingkungan Hidup hanya mengarahkan dan mengendalikan pemulung dan pengepul yang ada di sekitar wilayah TPA dan TPS.

***b. Democratic Accountability***

*Democratic Accountability*, merupakan gabungan antara administrative dan politic accountability. Menggambarkan pemerintah yang dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kinerja dan semua kegiatannya terhadap pemimpin politik.

Kepala dinas lingkungan hidup yang mempunyai peran untuk berpartisipasi dengan bupati dalam melaksanakan suatu kegiatan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas bantuan yang di tugaskan kepada daerah. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana di jelaskan pada ayat

(1) tentang penyelenggara fungsi kegiatan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup daerah, kemudian pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup daerah kepada masyarakat dan penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Perda Kota Bone Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah bahwa, memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampahnya dengan disediakannya fasilitas tempat sampah organik dan anorganik, pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampai ke TPA dengan terjaminannya pemisah sampah sesuai dengan jenis sampah, dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab pengelolah kawasan dimana pelaksanaan pengangkutan sampah tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah serta alat pengangkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan. Dan tugas lembaga pengelolaan sampah untuk menyediakan tempat sampah, pengangkut sampah dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas lingkungan hidup bapak AR yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah mengatakan

“Bahwa sampah yang ada di lingkungan Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone dikumpulkan oleh petugas kebersihan dari Dinas lingkungan Kota bone, Sampah-sampah yang dikumpulkan kemudian di buang ke tempat pembuangan sementara Pasar watampone. Sampah yang ada di tempat pembuangan sementara tersebut kemudian diangkut oleh pihak swasta yang bekerja sama oleh Dinas lingkungan Kota bone untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir yang bertempat dikelurahan passippo”. (Hasil wawancara AR, 25 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas lingkungan hidup dapat tergambarkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah sesuai perda Kota Bone Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah bahwa, memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampahnya dengan disediakannya fasilitas diberbagai tempat seperti di lingkungan pasar dan sekitarnya.

Sedangkan Sekretariat Dinas mempunyai tugas untuk berpartisipasi dengan Kepala Dinas dalam melaksanakan suatu tugas kegiatan koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah di jelaskan pada ayat (1) tentang penyelenggara fungsi sebagai penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup kemudian dalam pengorganisasian tugas-tugas pada Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan suatu pelayanan administrasi kepada bidang- bidang lain dinas lingkungan hidup dan penghimpunan bahan untuk menyusun peraturan-peraturan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris dinas lingkungan hidup ibu AT menyatakan bahwa

Sebagai sekretaris dari dinas lingkungan hidup tugas saya membantu kepala dinas untuk menyusun program dan menyusun anggaran belanja dinas lingkungan daerah untuk kabupaten bone termasuk yang jadi permasalahan sampah yang ada di pasar sentral palakka banyak sekali fasilitas-fasilitas disana yang masih kurang memadai. (hasil wawancara AT, 25 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dapat digambarkan bahwa tugas seorang sekretariat dinas lingkungan hidup dalam membantu tugas seorang kepala dinas dalam pengelolaan sampah di area pasar mempunyai tanggung jawab yang besar mulai dengan menyusun rencana program sampai dengan menyusun anggaran belanja dinas lingkungan hidup.

#### **D. Mekanisme Pemerintah Dalam Menangani Sampah Di Pasar Sentral Palakka Di Kabupaten Bone.**

##### **1. Kebersihan Lingkungan Pasar**

Akuntabilitas melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi yang mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak lingkungannya contohnya di lingkungan pasar. Dalam Perda Kota Bone Nomor 1 tahun 2015 menjelaskan masalah pengelolaan sampah terdapat suatu aturan hukum yang dapat dijadikan masalah hukum dalam pengelolaan sampah khususnya di pasar Sentral Palakka Di Kabupaten Bone. Aturan hukum mengenai sampah sangat penting mengingat dengan pesatnya pembangunan maka yang dihasilkan akan semakin meningkat. Segala macam organisme yang ada di alam ini selalu menghasilkan atau bahan buangan. merupakan beberapa sumber pencemaran manusia yang sangat berbahaya, yang dapat menimbulkan berbagai masalah. Ada berbagai faktor, seperti ketidakpedulian para industri,

pemerintah maupun masyarakat dalam menangani. Akibat pencemaran dari tersebut dapat menurunkan kualitas hidup manusia yang ada di lingkungan hidup yang tercemar tersebut. Pasar yang merupakan kawasan komersial, kawasan komersial merupakan kawasan tempat pemusatan suatu kegiatan usaha perdagangan jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang. Setiap harinya pasar menghasilkan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dari kepala dinas menyatakan bahwa pemerintah sudah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah yang ada di pasar dan sudah menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas yang di butuhkan sehingga tidak ada lagi yang membuang sampah di sembarang tempat khususnya di lingkungan pasar sentral watampone. Kemudian peneliti mendatangi pedagang pasar sentral watampone lalu mengadakan wawancara. Adapun hasil wawancara yang bertolak belakang dengan hasil wawancara di atas, pedagang pasar FT menyatakan bahwa

“Dipasar sentral Palakka ini para pedagang tidak memilah-milah sampahnya berdasarkan dua jenis sampah tersebut yaitu sampah organik dan sampah anorganik yang dikarenakan setiap pedagang hanya memiliki satu jenis sampah berdasarkan jenis usahanya masing-masing, misalnya pedagang sayuran hanya memiliki sampah sisa sayuran, jadi dengan sendirinya sampah itu telah terpilah menurut jenisnya” (hasil wawancara FH 26 september 2018)

Adapun hasil wawancara SU selaku pedagang pasar sebagai berikut:

“Kami pedagang hanya membersihkan sampah didepan tempat jualan kami masing-masing kemudian kami menyimpannya didepan tempat jualan kami agar pada saat sore hari sampahnya bisa diambil oleh petugas sampah” (hasil wawancara SU 26 september 2018)

Berdasarkan hasil wawancara SA dapat tergambarkan bahwa pengelolaan sampah di pasar Palakka belum sesuai dengan perda yang berlaku dimana sampah di pasar tidak dipisah sesuai dengan jenis sampahnya, dan

kurangnya fasilitas tempat sampah yang tersedia. Pihak pasar telah berupaya menyediakan tempat sampah namun karena kurangnya kesadaran pedagang dan masyarakat untuk menjaga fasilitas tersebut sehingga kondisi tempat sampah di pasar sangat kurang. Dan Belum adanya himbauan dari pengelola ke pedagang untuk melakukan pemilahan sampah, sehingga sulit untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah dipasar. Selain karena kesadaran pedagang yang kurang, himbauan dalam hal pengelolaan sampah di pasar, khususnya untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah di sumber sampah sangat kurang, sehingga pedagang juga tidak menganggap hal tersebut penting untuk dilakukan.

Pengumpulan sampah dipasar sentral Palakka di Kabupaten Bone dilakukan oleh masing-masing pedagang yang dikumpulkan dengan kantong plastik dan/atau karung yang kemudian petugas kebersihan mengangkat sampah tersebut dengan menggunakan gerobak ke tempat pembuangan sementara berupa kontainer atau langsung ke armada truk. Tempat pembuangan sementara tersebut berdasarkan hasil observasi tidak sesuai dengan sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan. Dimana tempat pembuangan sementara yang ada tidak menjamin terpisahnya sampah organik dan anorganik, dan pengumpulan pun dilakukan dengan mengumpulkan sampah di titik tertentu di dalam pasar. Kemudian peneliti mencari masyarakat setempat untuk di wawancarai. Berdasarkan hasil wawancara SP selaku masyarakat sekitar pasar menyatakan bahwa

“Saya kurang paham dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah pasalnya saya juga tidak terlalu memperhatikan aturan pemerintah itu seperti

apa. Karena pengelola pasar juga tidak memberikan arahan kepada pengunjung, hanya pemilik tempat jualan yang sadar diri, hasil wawancara SP “ (28 september 2018)

kemudian peneliti juga mencari masyarakat lagi yang berada di luar lingkungan pasar. Berdasarkan hasil wawancara AM selaku warga menyatakan bahwa

“Baunya sangat busuk kalau kita lewat situ. Mana lagi banyak alat yang berkecurunan, tentu hal ini bisa menimbulkan penyakit” ( Hasil wawancara AM september 2018)

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat setempat dapat di gambarkan bahwa tidak adanya tindakan pengelola pasar dan pemerintah untuk menghimbau ke pengunjung agar sampah mereka tidak berserakan di lingkungan pasar. keikutsertaan masyarakat sangatlah penting tanpa adanya himbauan, masyarakat dalam proses pengelolaan sampah akan sangat sulit mewujudkan pasar yang tertib sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone belum sesuai dengan Perda Kota bone. Proses pengelolaan sampah di Pasar Sentral palakka Di Kabupaten Bone, masyarakat cuma melakukannya dengan memasukkan sampah kedalam kantong plastik tanpa melakukan pemilahan dan dikumpulkan.

#### **E. Keberhasilan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Sentral Palakka Di Kabupaten Bone**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di Pasar Sentral Palakka tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dimana pemilahan dan pengumpulannya tidak sesuai dan tidak adanya

proses pengolahan sampah karena kurangnya arahan serta sarana dan prasarana dari pemerintah. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah kurangnya perhatian dari pemerintah, baik itu berupa himbauan kepada para pedagang, ataupun dengan memberikan subsidi dalam membantu pengelolaan sampah di pasar. Sehingga untuk melakukan pengolahan sampah sangatlah sulit.

Petugas kebersihan mempunyai agenda rutin setiap hari yaitu melakukan pembersihan lingkungan pasar sentral palakka kabupaten bone. Tapi karena kurangnya petugas kebersihan untuk membersihkan pasar sentral palakka yang sangat luas tersebut sehingga hasilnya kurang maksimal. Sehingga ikut sertanya petugas kebersihan yang lebih banyak untuk mengangkut sampah di pasar sambaloge watampone akan sangat membantu petugas kebersihan pasar dalam pengelolaan sampah dipasar sentral palakka kabupaten bone.

Pengelolaan sampah di area pasar sentral palakka dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Sebagai salah satu unsur pelaksana aturan pemerintahan mengelola kebersihan. Tapi upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah pada umumnya adalah kurang menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan sampah, termasuk menyediakan, tempat sampah, tempat pembuangan sementara, dan menyediakan alat pengangkut sampah berupa gerobak celeng, gerobak motor, dan armada truk.

Beberapa hal yang diatur dalam UU-18/2008 terkait dengan upaya minimasi (pembatasan) timbulan sampah sebagai berikut

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan kegiatan berupa:
  - a. Menetapkan suatu target menimalisir sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
  - b. Memfasilitasi suatu penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
  - c. Memfasilitasi suatu tindakan produk yang ramah lingkungan.
  - d. Memfasilitasi suatu kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
  - e. Memfasilitasi kegiatan produk-produk yang di daur ulang.
2. Pelaku usaha dalam melaksanakan suatu kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
3. Masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam
4. Pemerintah memberikan:
  - a. insentif kepada setiap orang atau masyarakat yang melakukan pengurangan sampah
  - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak dapat melakukan pengurangan sampah

Ketentuan tersebut di atas masih perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran. Akuntabilitas dilaksanakan dengan cara penyusunan perencanaan strategis, pelaksanaan kegiatan, pengukuran kinerja, dan pelaporan.

Akuntabilitas yang merupakan perwujudan suatu kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara periodik. Dokumen laporan atau profil tentang persampahan di kabupaten bone yang telah tersedia dan wajib dibuat oleh pemda untuk unit khusus masalah persampahan. Kemudian Sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dipasar sentral palakka dapat menjadi contoh. Penanganan sampah diperlukan pengawasan yang terus-menerus dan dievaluasi terus-menerus, antara lain pengawasan secara intern di dalam kawasan pasar tersebut.

Secara umum pola kegiatan pemerintah dalam pengelolaan sampah di pasar sentral palakka dimulai dengan pengumpulan sampah oleh petugas, selanjutnya diangkut oleh gerobak ketempat pemindahan atau TPS, selanjutnya dari TPS diangkut dengan truk ke TPA. Timbunan sampah domestik di pasar sentral palakka ini didistribusikan ke TPA. Pola operasional penanganan sampah dari sumber sampai TPA dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pewardahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram operasioanal pemerintah pengolahan sampah secara umum.

## **1. Pewardahan**

- a) Wadah sampah individual yang disediakan oleh setiap penghasil sampah sendiri sedangkan wadah komunal dan pejalan kaki disediakan oleh

pengelola dan swasta. Spesifikasi tempat yang sedemikian rupa sehingga memudahkan operasionalnya, tidak permanen dan higienis. Akan lebih baik apabila ada pemisahan wadah untuk sampah yang basah dan sampah kering.

- b) Pengosongan sampah dari tempat sampah individual yang dilakukan paling lama 2 hari sekali tetapi untuk tempat sampah komunal harus dilakukan setiap waktu.

## **2. Pengumpulan**

- a) Pengumpulan sampah yang bersumber dapat di susun secara langsung dengan menggunakan alat angkut atau tidak langsung dengan menggunakan gerobak dan secara komunal oleh masyarakat sendiri
- b) Penyapuan jalan juga sangat diperlukan pada daerah pusat kota seperti ruas jalan protokol, pusat perdagangan, taman kota dan lain-lain.

## **3. Pemindahan**

- a) Pemindahan jenis sampah dari alat pengumpul (gerobak) ke alat angkut (truk) dilakukan di transfer depo kemudian container untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan
- b) Lokasi penetapan sampah yang harus dekat dengan daerah pelayanan atau radius  $\pm 500$  meter
- c) Pemindahan dengan jarak kota ke stasiun transfer diperlukan jarak ke lokasi TPA yang lebih besar dari 25 km perjalanan.

#### 4. Pengangkutan

- a) Pengangkutan sampah secara langsung dari setiap pusat harus dibatasi pada daerah pelayanan yang tidak tepat cara kinerja atau pada daerah pelayanan yang tertentu berdasarkan pertimbangan keamanan maupun estetika dengan memperhitungkan besarnya biaya operasi yang harus dibayar oleh pengguna jasa
- b) Penetapan rute perjalanan pengangkutan sampah yang harus didasari pada hasil survey *time motion study* untuk mendapatkan jalur yang paling efisien.
- c) Jenis mobil truk yang menggunakan teknik khusus yang memiliki kemampuan membongkar muatan secara hidrolis, efisien dan cepat
- d) Penggunaan *arm roll truck* dan *compactor truck* harus tetap mempertimbangkan kemampuan dalam pemeliharaan

#### 5. Pengolahan

- a) Pengolahan sampah yang dimaksudkan untuk mengurangi suatu volume sampah yang harus dibuang ke TPA serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan.
- b) Teknologi pengolahan sampah yang dilakukan melalui tahap awal yaitu dengan kompos dan pemusnahan sampah secara mudah dan pemanfaatan gas metan dan daur ulang sampah. Khusus pemanfaatan gas metan di TPA (*landfill gas*), dapat masuk kedalam CDM (*clean developmant mechanism*) karena dapat berpengaruh dan signifikan untuk

mengurangi emisi gas rumah kaca yang berpengaruh langsung pada iklim global.

- c) Skala pengolahan sampah yang dimulai dari individual, komunal (kawasan), skala kota dan skala regional.
- d) Penerapan teknologi pengolahan yang memperhatikan aspek lingkungan, dana, SDM dan kemudahan operasional

## 6. Pembuangan akhir

- a) Pemilihan tempat TPA yang berdasarkan pada SNI 03-3241-1994 yang menjelaskan tentang tata cara pemilihan lokasi TPA. Agar keberadaan TPA tidak mencemari lingkungan dimana lokasinya yaitu di kelurahan passippo, maka jarak TPA ke badan air penerima lebih dari 100 meter, ke perumahan terdekat 500 meter, keairport 1500 m (untuk pesawat propeler) dan 3000 meter (untuk pesawat jet). Selain itu muka air tanah harus lebih dari 4 meter, jenis tanah lempung dengan nilai K kurang dari 10-6 cm/det.
- b) Metode penyelesaian akhir minimal harus dilakukan dengan menggunakan *controlled landfill* (khususnya untuk kota kecil dan kota besar) dan *sanitary landfill* (untuk kota besar dan metropolitan) dengan “sistem sel”
- c) Prasarana dasar minimal harus disediakan jalan masuk, drainase keliling dan pagar pengaman (dapat berfungsi sebagai *buffer zone*)
- d) Fasilitas perlindungan lingkungan yang harus disediakan meliputi lapisan dasar kedapair, jaringan pengumpul, pengolahan lindi dan ventilasi gas /

flaring atau land fill gas extraction yang bertujuan untuk mngurangi emisi gas.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pengelolaan sampah di Pasar Palakka Kabupaten Bone belum sesuai dengan perda yang berlaku dimana sampah di pasar tidak dipisah sesuai dengan jenis sampahnya, dan kurangnya fasilitas tempat sampah yang tersedia. Pihak pasar telah berupaya menyediakan tempat sampah namun karena kurangnya kesadaran pedagang dan masyarakat untuk menjaga fasilitas tersebut sehingga kondisi tempat sampah di pasar sangat kurang. Berdasarkan Perda Kota Bone Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah bahwa, memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampahnya dengan disediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik, pengumpulan yang dikerjakan pada saat pemindahan lokasi tempat sampah dari tempat sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampai ke TPA dengan jaminan pemindahan sampah sesuai dengan jenis sampah, dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
2. Pengelolaan sampah di pasar sentral palakka Kabupaten Bone dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Sebagai salah satu unsur pelaksana aturan Pemerintahan mengelola kebersihan. Akan tetapi upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah pada umumnya adalah kurang menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan sampah, termasuk menyediakan, tempat sampah, tempat pembuangan sementara, dan menyediakan alat

pengangkut sampah berupa gerobak celeng, gerobak motor, dan armada truk. Dimana pemilahan dan pengumpulannya tidak sesuai dan tidak adanya proses pengolahan sampah karena kurangnya arahan serta sarana dan prasarana dari pemerintah. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah kurangnya perhatian dari pemerintah, baik itu berupa himbauan kepada para pedagang, ataupun dengan memberikan subsidi dalam membantu pengelolaan sampah di pasar. Sehingga untuk melakukan pengolahan sampah sangatlah sulit.

#### **B. Saran**

1. Kepada Dinas lingkungan hidup sebaiknya mewajibkan kepada setiap pedagang di pasar sentral palakka untuk memiliki tempat sampah di area tempat jualan yang memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik
2. Kepada Dinas lingkungan hidup harus lebih menerapkan peraturan tentang kebersihan dan pemerintah harus mencukupi subsidi, sarana dan prasarana yang masih kurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. 2009. *Jalan Terjal Good Governance*. Pukap- Indonesia: Makassar.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Bungin D.G *Sinopsis Ekosistem Dan Sumber Daya Alam Pesisir Dan Laut* Institut Pertanian Bogor.
- Efrianof 2001. *Kebersihan Dan Sanitasi*. APK-TS. Jakarta.
- Elwood.1993. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Di Daerah*, Bima Aksara, Jakarta, 2001.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2004. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. CV Raga Meulaba: Jakarta
- Mardiasmo., 2009, *Akutansi Sektor Publik Yogyakarta* : ANDI
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Sosial* . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rasul, Sjahruddin et al., 2000 *Mengenal Proses Kebijakan Publik*, TIM AKIP BPKP, Jakarta.
- Rosjidi. 2001. *Akuntabilitas Sektor Publik: Kerangka Standar Dan Metode*, Surabaya: Aksara Satu
- Suyoto, Bagong 2008. *Fenomena Gerakan Mengelola Sampah*. Jakarta. PT Prima Infosar.
- Slamet, Julisoemirat, 2002 . *Kesehatan Lingkungan* .GajaMada University Press , Yogyakarta.
- Soewargono , 1996, *Ilmu Pemerintahan , Jati dirii dan Perkembangan* ,IIP Press , Jakarta.
- Supriatna, Tjahya. 2001. *Akuntabilitas Publik*. Jakarta.

## **JURNAL**

Dessy Kartika Sari. 2017. *Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarindah DiKacamatan Sambutane Journal Ilmu Pemerintahan 5 (4) 2017,1497-1508*ISSN 2472-2458 (Online) ISSN 2477-2631 (Cetak) [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id) Copyright 2017.

Erfina R. N.2016. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Domestik Di Kelurahan Kotamobagu. *Jurnal*

Nur Rahmawati Sulistiyorini.2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Dilingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Jurnal* ISSN:2339 - 0042

Riskawati Syam (2012) Pengelolaan Sampah Di Pasar Terong Kota Makassar. *Jurnal*

## **Undang-Undang**

2008. Undang-Undangf Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Perda Kota Bone Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah

**1. Dokumentasi saat melakukan penelitian di kantor (DLH) Dinas Lingkungan Hidup**







## BIODATA PENELITI



**Ikawati**, Lahir di Lapabua, Desa Lagori Kabupaten Bone. Pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober tahun 1996. Anak ke empat dari lima bersaudara. Dari pasangan Almarhum Tola dan Tahra memiliki kakak pertama Bernama Yemmang, kakak kedua bernama Yante, kakak ketiga bernama Yarima Dan adik Laki-laki bernama Andika. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inp.12/79 Pattuku Limpoe dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Lappariaja lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya di SMK Kesehatan

Yapi Bone dengan mengambil jurusan Perawat dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone”**